

MODEL KOMUNIKASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BINTAN

Almar Ananda^{1(a)}, Jamhur Poti^{2(b)}, Agus Hendrayady^{3(c)}

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

^{a)}2005020009@student.umrah.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

30-01-2024

Diterbitkan Online:

31-03-2024

Kata Kunci:

Komunikasi Dua Arah,
Penanggulangan Bencana,
Bencana Kebakaran Hutan dan
Lahan

ABSTRAK

Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan tertinggi pada tahun 2022 dari Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah 155 kejadian. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan bersama Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu, terlambatnya komunikasi antara BPBD dan UPTD Pemadam Kebakaran dengan pemangku kepentingan lainnya dikarenakan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan daerah Kabupaten Bintan. Dari fenomena yang terjadi, masih kurangnya kepercayaan penerima pesan dalam menerima pesan dari pemberi pesan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model komunikasi dan faktor-faktor penghambat dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori Model Komunikasi Wilbur Schramm menunjukkan bahwa (1) Pada indikator sumber, pemberi pesan telah melakukan komunikasi seperti Sekolah, Masyarakat, Kelurahan, RT/RW, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Namun dalam pelaksanaannya sumber pemberi pesan masih belum memahami mekanisme untuk melaporkan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan. (2) Pada indikator pesan, ditandai dengan laporan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan yang disampaikan melalui media Whatsapp, Instagram dan Media Massa. Namun pesan yang disampaikan tidak selalu lengkap, akurat dan tepat. (3) Pada indikator sasaran, masih terdapat hambatan dalam komunikasi dan kurangnya kepercayaan dalam menerima laporan bencana kebakaran hutan dan lahan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah model komunikasi dua arah yang digunakan sudah berjalan. Namun, komunikasi dua arah yang dilakukan masih terdapat hambatan karena belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan daerah Kabupaten Bintan. Saran dalam penelitian ini adalah perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi sesuai zaman yang semakin maju yakni Pusat Panggilan atau Call Center khususnya di Kabupaten Bintan untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan cepat dan tanggap.

Keywords:

Two-way Communication,
Disaster Management, Land and
Forest Fire Disaster

Corresponding Author:

2005020009@student.umrah.ac.id

ABSTRACT

Forest and land fire disasters in Bintan Regency were the highest in 2022 out of the regencies/cities in Riau Islands Province with 155 incidents. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Bintan Regency together with the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of the Bintan Regency Fire Department are responsible for disaster management of forest and land fires. Apart from that, there is a delay in

communication between BPBD and UPTD Fire Department and other stakeholders due to the lack of Standard Operating Procedures (SOP) that are appropriate for the Bintan Regency area. From the phenomenon that occurs, there is still a lack of trust in message recipients in receiving messages from message givers. The purpose of this research is to find out the communication model and inhibiting factors in forest and land fire disaster management by the Regional Disaster Management Agency of Bintan Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. The data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Based on the results of research using the Wilbur Schramm Communication Model theory, it shows that (1) In the source indicator, the messenger has communicated such as Schools, Communities, Villages, RT / RW, Bhabinkamtibmas and Babinsa. However, in its implementation, the source of the messenger still does not understand the mechanism for reporting forest and land fire disaster events. (2) In the message indicator, it is characterized by reports of forest and land fire disasters delivered through Whatsapp, Instagram and Mass Media. However, the messages conveyed are not always complete, accurate and precise. (3) In the target indicator, there are still obstacles in communication and lack of trust in receiving reports of forest and land fire disasters. The conclusion in this research is that the two-way communication model used is already running. However, the two-way communication carried out still has obstacles because there is no Standard Operating Procedure (SOP) for communication of forest and land fire disaster management in accordance with the Bintan Regency area. The suggestion in this research is that there is a need to utilize information technology according to increasingly advanced times, namely Call Centers, especially in Bintan Regency, to handle forest and land fire disasters quickly and responsively.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i1.171>

PENDAHULUAN

Letak strategis Indonesia memberikan keuntungan karena di lewati oleh jalur garis khatulistiwa dan juga dengan hutan yang luas dimana Indonesia memiliki banyak kekayaan alam didalamnya yang tentunya hal ini dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat (Achyar, 2023). Indonesia memiliki hutan terluas ketiga di dunia baik itu hutan tropis maupun hutan hujan (Saputra, 2022). Kabupaten Bintan memiliki luas hutan lindung 19.945,00 hektare, hutan produksi terbatas 6.387,00 hektare dan kawasan konservasi 1.223,00 hektare (Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2024).

Hutan memiliki peran sebagai tempat hidup bagi flora dan fauna serta sebagai penyuplai oksigen bagi keberlangsungan hidup dari makhluk hidup di bumi. Selain itu, hutan juga berfungsi untuk menyimpan, mengatur serta menjaga persediaan dan keseimbangan air pada saat musim hujan dan kemarau, menyuburkan tanah, mencegah terjadinya erosi ataupun tanah longsor juga menjaga keberlangsungan

ekosistem (Sinaga, 2023). Jika hutan yang ada di Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang akan berdampak negatif baik bagi manusia maupun ekosistem alam (Pasaribu, 2022). Masalah yang muncul dari luasnya hutan di Indonesia adalah tingginya potensi bencana kebakaran hutan dan lahan dimana masalah ini selalu ada, terutama pada musim kemarau (Nugroho, 2000).

Terdapat 90% kejadian kebakaran hutan dan lahan sengaja dilakukan oleh masyarakat. Pembukaan lahan baru untuk pertanian, HTI (Hutan Tanaman Industri), dan aktivitas manusia di dalam hutan seperti berkemah, berburu, dan piknik merupakan beberapa contoh aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) (Purbowaseso, 2004). Dampak lainnya yaitu kerugian lingkungan yaitu berkurangnya luas wilayah hutan, tidak tersedianya udara bersih serta hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap air dan pencegah terjadinya erosi (Rasyid, 2014). Adapun data

kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Bencana Alam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No.	Bencana Alam	Kejadian
1.	Abrasi	4
2.	Kebakaran Hutan dan Lahan	323
3.	Petir	4
4.	Gelombang Pasang	13
5.	Angin Kencang	100
6.	Banjir	71
7.	Longsor	14

Sumber Data: BPBD Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data diatas, bahwa jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 tercatat antara lain abrasi 4 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 323 kejadian, petir, 4 kejadian, gelombang pasang 13 kejadian, angin kencang 100 kejadian, banjir, 71 kejadian, dan longsor 14 kejadian. Dari data tersebut, bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang tertinggi dan sering terjadi di Provinsi Kepulauan pada tahun 2022.

Tabel 2. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Kejadian
1.	Kota Batam	2
2.	Kota Tanjungpinang	67
3.	Kabupaten Bintan	155
4.	Kabupaten Karimun	48
5.	Kabupaten Natuna	44
6.	Kabupaten Lingga	7
7.	Kabupaten Anambas	0
Total		323

Sumber Data: BPBD Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan data diatas, bahwa kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan yang di terjadi di Kabupaten/Kota tercatat pada tahun 2022. Data menunjukkan bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan antara lain Kota Batam 2 kejadian, Kota Tanjungpinang 67 kejadian, Kabupaten Bintan 155 kejadian, Kabupaten Karimun 48 kejadian, Kabupaten Natuna 44 kejadian, Kabupaten Lingga 7 kejadian, dan Kabupaten Anambas 0 kejadian. Dari data tersebut, Kabupaten Bintan

merupakan yang tertinggi dalam bencana kebakaran hutan dan lahan diantara Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bintan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Kejadian
1.	Bintan Timur	55
2.	Toapaya	31
3.	Teluk Sebong	14
4.	Bintan Utara	40
5.	Seri Kuala Lobam	9
6.	Gunung Kijang	47
7.	Teluk Bintan	3
8.	Tambelan	0
9.	Mantang	0
10.	Bintan Pesisir	0
Total		199

Sumber Data: BPBD Kabupaten Bintan

Berdasarkan data diatas, bahwa jumlah bencana kebakaran hutan dan lahan setiap Kecamatan di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 tercatat antara lain Bintan Timur 55 kejadian, Toapaya 31 kejadian, Teluk Sebong 14 kejadian, Bintan Utara 40 kejadian, Seri Kuala Lobam 9 kejadian, Gunung Kijang 47 kejadian, Teluk Bintan 3 kejadian, Tambelan 0 kejadian, Mantang 0 kejadian dan Bintan Pesisir 0 kejadian. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang, Bintan Utara, Toapaya, Teluk Sebong dan Seri Kuala Lobam yang berpotensi dan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 4. Luas Kerugian Akibat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Bintan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (Ha)
1.	Bintan Timur	23,15
2.	Toapaya	59
3.	Teluk Sebong	22
4.	Bintan Utara	61,5
5.	Seri Kuala Lobam	29
6.	Gunung Kijang	140,56
7.	Teluk Bintan	17,035
8.	Tambelan	0
9.	Mantang	0
10.	Bintan Pesisir	0
Total		352, 245 Hektare (Ha)

Sumber Data: BPBD Kabupaten Bintan

Berdasarkan data diatas, bahwa luas kerugian lahan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan pada tahun 2023 tercatat antara lain Bintan Timur 23,15 ha, Toapaya 59 ha, Teluk Sebong 22 ha, Bintan utara 61,5, Seri Kuala Lobam 29 ha, Gunung Kijang 140,56 ha, Teluk Bintan 17,035 ha, Tambelan 0 ha, Mantang 0 ha dan Bintan Pesisir 0 ha.

Setiap kejadian bencana tentunya ada tindakan pencegahan untuk menanggulangi bencana yang terjadi. Bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Maka dari itu, terbentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau (BNPB) merupakan lembaga pemerintah non departemen yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan memberikan pertanggungjawab kepada penegak hukum bagi masyarakat yang melakukan tindakan membakar hutan dan lahan dengan sanksi tindak pidana. Masyarakat yang melakukan tindakan membakar akan diproses secara hukum. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas dan fungsi yakni pengkoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terencana dan teratur sesuai dengan wewenangnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan berkerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran yang saat ini telah bergabung selalu siap siaga dalam kejadian kebakaran hutan dan lahan. Adapun 3 lokasi titik UPTD Pemadam Kebakaran yang ada di Kabupaten Bintan yaitu Kijang, Toapaya, dan Tanjung Uban. Penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan telah dilaksanakan oleh UPTD Pemadam Kebakaran dalam meredakan kebakaran sesuai dengan daerah jangkauannya. Namun, hal tersebut masih kurang efektif karena wilayah Kabupaten Bintan yang sangat luas dengan

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Pemadam Kebakaran masih belum maksimal sehingga untuk menjangkau tempat tersebut memerlukan waktu yang cukup lama.

Sesuai Instruksi Nomor 3 Tahun 2020 yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, disebutkan dalam Instruksi pertama bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk dengan melakukan kegiatan seperti pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah terdiri atas 3 (tiga) tahap, meliputi: pra bencana; saat tanggap darurat; dan pasca bencana.

Dalam buku (Hendrayady, 107:2021) model Scramm dapat melukiskan bagaimana komunikasi yang statis berubah menjadi komunikasi bersifat dua arah. Wilbur Scramm mengembangkan tiga model komunikasi yang pertama Scramm mengembangkan model komunikasi statis sederhana yang mirip dengan model Shanonn Weaver, model keduanya melihat bagaimana pengalaman membentuk komunikasi, model ini mengasumsikan bahwa semakin besar pengalaman antar inividu yang bertukar pesan maka pertukaran pesan akan semakin mudah, sebaliknya jika tidak ada pengalaman antar individu maka tidak akan ada interaksi komunikasi. Pada model ketiganya Scramm mengatakan bahwa komunikator sekaligus sebagai komunikan. Dari Model Scramm model komunikasi sudah mulai berkembang dari model yang statis menjadi model yang dinamis. Fungsi dari Model Scramm mengetahui serangkaian model yang pada awalnya model komunikasi yang statis lalu berubah menjadi dinamis. Manfaat dari model ini adalah menjadi referensi dasar tentang komunikasi dua arah yang menyatakan bahwa komunikator juga berperan sebagai komunikan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan sebagai *leadingsector* dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan mempunyai peran penting dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat atau kelompok sosial sebagai pemberi pesan kepada BPBD

atau UPTD Pemadam Kebakaran sebagai penerima pesan memerlukan waktu untuk membenarkan apakah kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan benar atau salah sehingga mengakibatkan penanggulangan bencana terlambat. Dari fenomena yang terjadi, masih kurangnya kepercayaan penerima pesan dalam menerima pesan dari pemberi pesan.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Bintan masih belum terintegrasi. Hal ini, terlihat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan serta penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan. Masyarakat mempunyai potensi berupa pengetahuan, keterampilan dan motivasi yang tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi dan melakukan penanganan bila terjadi bencana (Anggraini et al., 2021). Disamping itu, terlambatnya komunikasi antara BPBD dan UPTD Pemadam Kebakaran dengan pemangku kepentingan lainnya dikarenakan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sesuai dengan daerah Kabupaten Bintan.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti melaksanakan penelitian ini karena permasalahan yang terjadi yakni bencana kebakaran hutan dan lahan yang menjadi bencana tertinggi dan sering terjadi di Kabupaten Bintan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Model Komunikasi Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku (Samsu, 86:2017) metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian deskriptif menurut Punaji Setyosari dalam buku (Samsu, 65:2017) adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun

kata-kata. Objek penelitian ini adalah Model Komunikasi Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Kabupaten Bintan. Lokasi penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan dengan alamat Jl. Raya Tanjung Pinang – Tanjung Uban Kilometer 42, Bandar Sri Bentan. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena urgensi masalah bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi dan berdampak kepada masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti tentang Model Komunikasi serta Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan. Peneliti dalam melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah menggunakan teori model komunikasi menurut Wilbur Schramm dalam buku (Hendrayady, 97:2021).

Peneliti dalam mengumpulkan data dengan alat pengumpulan data antara lain wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya informan penelitian pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang terdiri dari 12 informan penelitian antara lain Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan, dan Masyarakat. Teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka untuk mengetahui Model Komunikasi serta Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan. Peneliti menggunakan teori Model Komunikasi menurut Wilbur Schramm dalam buku (Hendrayady, 97:2021) yang terdiri dari Sumber (*Source*), Pesan (*Message*) dan Sasaran (*Destination*). Model Komunikasi menurut Wilbur Schramm dapat dimaknai bahwa komunikator dan komunikan dapat berganti posisi dan proses komunikasi dapat terus berlanjut. Dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan, peneliti melakukan penelitian dengan berdasarkan pada Peraturan

Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah terdiri dari 3 (tiga) tahap yakni pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Model Komunikasi Pra-Bencana dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan

Pada saat pra bencana yang menjadi sumber (*source*) yakni instansi Sekolah. Pesan (*message*) yang disampaikan berupa surat undangan untuk mengisi sosialisasi, edukasi kepada anak-anak mengenai pencegahan, pemahaman terkait penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan disampaikan melalui media Whatsapp. Selanjutnya, sasaran (*destination*) yakni Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten Bintan dan UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan mendapatkan pesan berupa surat undangan dengan menyandikan dalam bentuk pesan dan dikirimkan kembali sebagai umpan balik (*feedback*) akan melaksanakan sosialisasi dan edukasi.

Model Komunikasi Saat Tanggap Darurat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan

Pada saat tanggap darurat yang menjadi sumber (*source*) yakni masyarakat, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Bintara Pembina Desa (Babinsa). Pesan (*message*) yang disampaikan terlebih dahulu disandikan yakni berupa laporan telah terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan siapa yang melaporkan, lokasi kejadian, kapan kejadian, luas hutan dan lahan yang terbakar serta bukti dokumentasi yang dikirimkan kepada komunikator melalui media aplikasi Whatsapp. Selanjutnya, sasaran (*destination*) yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan menerima pesan dalam bentuk laporan kejadian yang dikirim oleh komunikator dengan menyandikan dalam bentuk pesan dan dikirimkan kembali sebagai umpan balik (*feedback*) berupa respon tanggap untuk melaksanakan penanggulangan bencana

kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan.

Model Komunikasi Pasca-Bencana dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan

Pada saat pasca bencana yang menjadi sumber (*source*) yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan yang didata dalam bentuk laporan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan. Pada tahap saat tanggap darurat dan pasca bencana kebakaran hutan dan lahan bentuk pesan yang akan didata oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan. Pesan (*message*) yang disampaikan berupa laporan kejadian seperti siapa yang melapor, di mana kejadian, kapan kejadian, berapa luas hutan dan lahan yang terbakar serta dokumentasi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) responsif 15 menit melalui media aplikasi Whatsapp, Instagram dan media massa. Selanjutnya, sasaran (*destination*) yakni Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Bupati Bintan, Wakil Bupati Bintan, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kepulauan Riau, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan menerima pesan dalam bentuk laporan kejadian yang dikirim oleh komunikator dengan menyandikan dalam bentuk pesan dan dikirimkan kembali sebagai umpan balik (*feedback*).

Faktor-Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan

Adapun faktor-faktor penghambat yang ditemukan yaitu sulitnya akses jalan untuk dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran, kurangnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dalam hal ini akan berdampak pada pengadaan sarana dan prasarana yang masih belum mencukupi sehingga komunikasi dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan belum menjadi Dinas sehingga ruang lingkup gerak terhambat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa model komunikasi dua arah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan dengan pemangku kepentingan lainnya telah berjalan. Akan tetapi, komunikasi dua arah yang dilakukan masih terdapat hambatan.

Maka terdapat saran dari peneliti supaya komunikasi yang dilaksanakan dapat berjalan dengan optimal tanpa harus mengalami kendala. Perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi sesuai zaman yang semakin maju yakni Pusat Panggilan atau *Call Center* khususnya di Kabupaten Bintan untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan cepat dan tanggap. Saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan sebagai berikut:

1. Sumber (*Source*). Pada indikator sumber pemberi pesan atau komunikator telah berjalan. Akan tetapi, masyarakat atau kelompok sosial Kabupaten Bintan masih belum memahami mekanisme dalam melaporkan kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Bintan melaksanakan sosialisasi berupa memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Bintan secara rutin supaya masyarakat dapat mengetahui mekanisme penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
2. Pesan (*Message*). Pada indikator pesan yang disampaikan oleh sumber pemberi pesan atau komunikator telah berjalan. Peneliti memberikan saran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan untuk membuat inovasi pelayanan publik apakah itu dalam bentuk website, aplikasi untuk masyarakat akses dengan mudah sehingga pesan yang dilaporkan terkait kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan dapat secara langsung melalui media tersebut serta dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan yang terlibat. Selain itu, informasi mengenai mekanisme

melapor dapat dilihat dan diakses oleh masyarakat langsung. Mengapa demikian, karena hal ini berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang mempunyai kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan akses mudah kepada masyarakat.

3. Sasaran (*Destination*). Pada indikator sasaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Bintan telah berjalan menjadi sasaran. Akan tetapi, peneliti memberikan saran perlu meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Dikarenakan apapun bentuk laporan yang dilaporkan apakah itu benar atau salah, tetap lebih baik dilaksanakan walaupun harus turun ke lokasi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, perlu membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) komunikasi penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan yang sesuai dengan daerah Kabupaten Bintan.
4. Hambatan. Perlu adanya pengadaan sarana prasarana dari anggaran yang dimiliki seperti penambahan mobil pemadam kebakaran, alat komunikasi yang efektif, alat pendeteksi api, Sistem Penyiram Air atau *Fire Hydrant System* sehingga penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan dapat berjalan dengan optimal tanpa mengalami hambatan. Selain itu, melakukan kajian mengenai apakah UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Bintan layak untuk menjadi Dinas sehingga dapat mengelola anggaran secara langsung serta mempermudah komunikasi secara cepat dan tanggap dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bintan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fiske, J. (2012). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
- Hendrayady, Agus. dkk. (2021). *Mengenal Komunikasi* (S. Sastroatmodjo (Ed.)). Media Sains Indonesia.
- Ibrahim, A. (2018). *Metodologi Penelitian* (M. S. Dr. H. Ilyas Ismail. M.Pd. (Ed.)). Gunadarma Ilmu.

- Marihot, Y., & Sari, S. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Multidisiplin Madani (MUDIMA)*.
- Miles, H. (2005). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, D. (2014). *Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pahleviannur, M. R. (2022). *Paradigma Penelitian Kualitatif* (F. Sukmawati(Ed.)): Pradina Pustaka.
- Purbowaseso, B. (2004). *Conservation program on critical land of Riam Kanan watershed in South Kalimantan (Indonesia)*. *Tropika (Indonesia)*.
- Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (Rusmini (Ed.); 1st ed.). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto. (2015). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Achyar, A. M. (2023). *Strategi Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Anggraini, T., Agustian, D. (2021). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kabupaten Musi Banyuasin*.
- Fitria, D., Rasyid, A., & Wirman, W. (2022). *Komunikasi Kebijakan Manggala Agni dalam Pengendalian Karhutla saat Pandemi Covid-19 di Provinsi Riau*. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, 4(2), 177–185. <https://doi.org/10.33366/jkn.v4i2.146>
- Frasetya, V., Corry W, A., Trenggono, N., & Putra, P. (2021). *Komunikasi Mitigasi Bencana Kota Bandar Lampung*. *Komunika*, 4(1), 01–18.
- Firdaus, H. (2022). *Strategi Komunikasi Dinas Pemadam Kebakaran Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Penukman di Jakarta Timur*. <http://repository.unas.ac.id/5504/>
- Hatta, M. (2008). *Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sifat-Sifat Tanah di Kecamatan Besitdang Kabupaten Langkat*. Skripsi. Medan: USU.
- Mas'ut, D. K. (2022). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Kebakaran Kawasan Permukiman di Kota Balikpapan*.
- Murliana, Fauziah, N., & Mia, M. (2020). *Komunikasi Dalam Penanggulangan Bencana Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Melalui Pendekatan Budaya (Studi Kasus Pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dalam Meningkatkan Pemahaman Tentang Penanggulangan Bencana Melalui Pertunjukan Wayang Kulit di Kabupaten Purworejo)*.
- Nasruddin, Siswanto. (2023). *Strategi Pencegahan Kebakaran Lahan Gambur di Kawasan Hutan Lindung Liang Anggang KPH Kayu Tangi Kota Banjarbaru*.
- Nugroho, S. P. (2000). *Minimalisasi Konsentrasi Penyebaran Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan dengan Metode Modifikasi Cuaca*. *Jurnal Sains & Teknologi Modifikasi Cuaca*. Vol 1(1): Hal 1-8.

- Nurani, A. R. (2019). *Model Komunikasi Bantuan Bencana Studi Kasus Komunikasi Dalam Penyaluran Bantuan Bencana Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Banjir di Gunungkidul Tahun 2017*.
- Pasaribu, H. A. (2022). *Strategi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah*.
- Rasyid F. (2014). *Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan*. Jurnal Lingkungan Widyaswara.
- Saputra, M. R. (2022). *Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Tanggap Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat*.
- Sinaga, M. (2023). *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat*.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Bupati Bintang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bintang.
- Peraturan Bupati Bintang Nomor 42 Tahun 2022 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah.